

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pelaksanaan otonomi daerah mulai dilaksanakan pada tahun 2001. Untuk mewujudkan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat melalui upaya pemberdayaan pemerintah daerah diperlukan pengelolaan keuangan daerah yang bagus. Seiring berjalannya otonomi daerah setelah ditetapkan. Koswara (2000:5) mengatakan bahwa bagi daerah otonom, pemerintah daerah memiliki kewenangan dan kemampuan untuk menyelenggarakan pemerintahan dengan menggunakan keuangan sendiri dengan mencari atau mengelola potensi yang dimiliki daerahnya. Semaksimal mungkin diharapkan pemerintah daerah bergantung kepada pemerintah pusat. Hingga menjadikan PAD sebagai sumber keuangan daerah terbanyak yang menjadi dasar dalam menjalankan pemerintahan daerah.

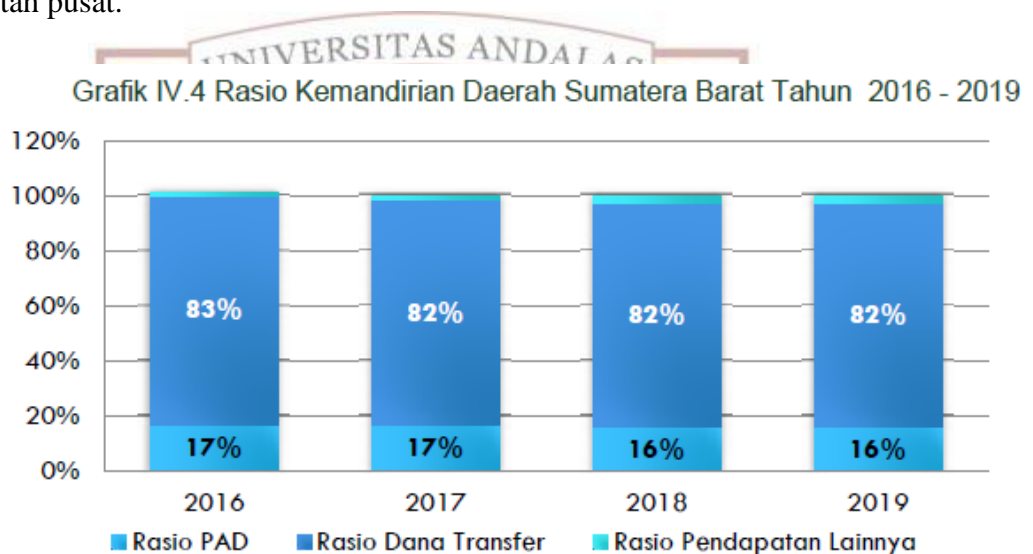
Pendapatan asli daerah seharusnya menjadi dasar dana bagi pelaksanaan APBD karena PAD ialah indikator wajib daerah ketika menyelenggarakan dan mewujudkan APBD. Pendapatan asli daerah ialah modal dalam melakukan pembangunan dan menyelenggarakan pemerintahan daerah. Banyaknya jumlah PAD ialah indikator suatu daerah dapat dikatakan mandiri walaupun belum bisa menutupi semua pembiayaan daerah.

PAD dinantikan bisa mencukupi kebutuhan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Biar pun PAD dinantikan sebagai modal utama dalam pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan tetapi kondisinya belum sesuai yang diharapkan, artinya total pendapatan asli daerah belum dapat menutupi total pengeluaran daerah.

Tujuan lain pemerintah daerah yaitu dapat mencapai kemandirian fiskal. Hal ini ialah faktor penting untuk mengukur kemahiran pemerintah untuk mendanai sendiri penyelenggaraan pemerintah daerah tanpa bergantung pada bantuan dari luar termasuk dari pemerintah pusat. Namun pada kondisi sebenarnya masih terdapat wilayah yang mengandalkan dana dari pusat dalam pembangunan daerah. Dana tersebut berasal dari pemasukan APBN yang disalurkan pusat ke daerah

sebagai dana pelaksanaan desentralisasi yang biasa disebut sebagai dana perimbangan.

Untuk melihat mandiriya suatu daerah (Kemandirian Fiskal) dapat dibandingkan antara dana transfer daerah dengan persentase PAD. apabila persentase PAD lebih besar daripada dana transfer ke daerah, ini bisa diartikan daerah semakin mandiri atau daerah tersebut dapat membiayai pembiayaannya sendiri. Dan sebaliknya jika persentase dana transfer daerah melebihi persentase PAD dalam pembiayaan daerah maka daerah tersebut masih bergantung kepada pemerintah pusat.



Sumber: GFS Kanwil Sumbar, diolah

Dari grafik rasio kemandirian daerah Sumatera Barat diatas dapat disimpulkan pada tahun 2016 hingga 2019 perbandingan persentase dana transfer dengan jumlah semua pendapatan masih tinggi yakni berada pada 82%. Artinya Sumatera Barat belum bisa mendanai sendiri penyelenggaraan pemerintahannya dan membutuhkan bantuan dana dari pusat sehingga tingkat kemandirian pemerintahannya masih rendah.

Hal itu juga terjadi kepada PAD. Perbandingan persentase PAD dengan persentase total pendapatan terlihat menurun dari tahun 2016 sampai 2019. Hal ini bisa juga disebabkan pemerintah belum maksimal dalam mengelola potensi yang dapat dijadikan sebagai pendapatan daerah.

Dalam pemerintahan Provinsi Sumatera Barat, penyumbang keuangan terbesar adalah PKB dan BBNKB. PAD Sumbar mencapai Rp.1,56 triliun dan diprediksi naik 3,3 persen atau Rp.1,62 triliun pada tahun berikutnya. Jika dibandingkan bersama wilayah lainnya, Sumatera Barat memiliki pendapatan asli daerah yang kecil dipulau Sumatera. Dengan Aceh dan Riau mempunyai potensi kilang minyak dan gas, Sumut memiliki potensi perkebunan, Sumsel dengan potensi tambang dan Lampung sebagai daerah jalur ekonomi.

Berdasarkan UPTD-P3 (Unit Pelaksana Teknis Daerah Pelayanan Pendapatan Provinsi) kota padang menunjukkan realisasi PKB dan BBNKB sudah melampaui target Rp.633.643.004.475 atau sekitar 104,04 persen. Sedangkan target pada waktu itu Rp.609.023.826.000, dan menjelang akhir tahun juga menembus mencapai Rp.640 miliar dengan ini UPT-P3 kota padang menyumbang 65 persen PAD bagi daerah.

Pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah merupakan sumber PAD jika dilihat dari sumbernya. namun tidak menghambat kemungkinan terdapat indikator lain yang berpotensi dapat mempengaruhi jumlah pendapatan asli daerah. Selain PKN juga BBNKB terdapat hal lain yang berpengaruh terhadap PAD Sumatera Barat. Diantaranya pertumbuhan ekonomi, tarif pajak, jumlah perusahaan dan Desentralisasi Fiskal, Product Domestik Regional Bruto (PDRB), jumlah penduduk, jumlah kendaraan bermotor yang membayar pajak.

Dari berbagai hal diatas, penulis hanya membatasi analisis pengaruh PDRB, jumlah penduduk dan jumlah kendaraan terhadap pendapatan asli daerah Sumatera Barat. Ketiga hal tersebut memiliki hubungan atau pengaruh terhadap PAD. PDRB merupakan pencerminan dari kemajuan ekonomi suatu wilayah, saat PDRB suatu wilayah meningkat maka akan meningkatkan pendapatan diberbagai sektor wilayah tersebut.

Dengan jumlah penduduk yang semakin banyak tiap tahunnya disuatu daerah akan meningkatkan konsumsi barang, jasa dan fasilitas yang ada didaerah tersebut seperti restoran, angkutan umum, pekerjaan, tempat hiburan, penggunaan

listrik, bangunan dan lain-lain. Konsumsi terhadap hal tersebut tentu akan menambah jumlah pajak yang akan diterima oleh daerah yaitu pajak restoran, pajak hiburan dan pajak penghasilan yang merupakan sumber keuangan daerah.

Bertambahnya jumlah penduduk akan beriringan dengan bertambahnya jumlah kendaraan bermotor. Saat orang memiliki kendaraan tentu ia akan membutuhkan tempat parkir, servis dan dengan banyaknya kendaraan akan cukup menambah PAD dari lahan PAD dari lahan parkir berupa retribusi daerah dan PKB dan BBNKB juga dari pelanggaran dari aturannya.

Dari berbagai hal diatas yang berpengaruh terhadap PAD Sumatera Barat, peneliti hanya membatasi masalah untuk menganalisis tiga hal yang mempengaruhi PAD yaitu PDRB, jumlah kendaraan bermotor dan jumlah penduduk, sehingga didapatkan judul penelitian “Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah Sumatera Barat” .



1.2 Rumusan Masalah

Kemandirian fiskal ialah salah satu tujuan yang dicapai pemerintah daerah. Hal ini adalah faktor penting untuk menentukan kemampuan daerah dalam mendanai sendiri kegiatan pemerintah daerah dengan tidak bergantung kepada pemerintah pusat atau pihak lain.

PAD adalah salah satu hal yang membantu pemerintah daerah dalam mencapai kemandirian fiskal dan sekaligus penyumbang terbesar dalam APBD. Jika PAD suatu daerah cukup tinggi dan cukup untuk menjalankan pemerintahan dengan dana itu, sehingga bisa memahami apa saja yang dapat membuat PAD berubah tiap tahunnya

Berlandaskan paparan diatas maka dibuat beberapa problema pada penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh PDRB terhadap pendapatan asli daerah Sumatera Barat.
2. Bagaimana pengaruh jumlah penduduk terhadap pendapatan asli daerah Sumatera Barat.
3. Bagaimana pengaruh jumlah kendaraan bermotor terhadap pendapatan asli daerah Sumatera Barat.

1.3 Tujuan Penelitian

Berlandaskan pemaparan latar belakang dan rumusan masalah diatas, sehingga diperoleh tujuan penelitian:

1. Untuk menganalisis bagaimana pengaruh PDRB terhadap Pendapatan Asli Daerah Sumatera Barat.
2. Untuk menganalisis bagaimana pengaruh jumlah penduduk terhadap Pendapatan Asli Daerah Sumatera Barat.
3. Untuk Menganalisis bagaimana pengaruh jumlah kendaraan bermotor terhadap Pendapatan Asli Daerah Sumatera Barat.

1.4 Kegunaan Penelitian

1. Sebagai informasi kepada publik mengenai pengaruh PDRB terhadap PAD Sumbar.
2. Sebagai informasi kepada publik mengenai pengaruh Jumlah Penduduk terhadap PAD Sumbar.
3. Sebagai Informasi kepada publik mengenai pengaruh Jumlah Kendaraan Bermotor terhadap PAD Sumbar.

Penelitian ini dapat berguna sebagai acuan penelitian berikutnya tentang PAD.

